

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada akhir tahun 2019 dunia dilanda virus covid-19 yang berasal dari Wuhan, China. Virus ini telah dijadikan pandemi global oleh WHO karena tersebar luas di seluruh negara termasuk Indonesia (Jaeni, 2022). Menurut data laporan perekonomian (Bank Indonesia, 2020), Covid-19 ini telah masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, kondisi tersebut mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi di seluruh negeri. Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut mempengaruhi kegiatan bisnis yang kemudian mempengaruhi perekonomian.

Fenomena wabah pandemi ini mendesak pemerintah pusat untuk menuntut kebijakan dengan melaksanakan kebijakan otonomi daerah dengan kewenangan umum sesuai UU No. 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani Pandemi Covid 19 serta menghadapi ancaman perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (jdih.setkab.go.id, 2020). Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dan serius dalam menangani kasus covid-19 dengan cara peningkatan kemandirian suatu daerah dengan perananan pendapatan asli daerah sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan

efektif yang berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Jaeni, 2022).

Pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap pasar dan rantai pasokan produk, bisnis diwajibkan untuk ditutup atau dikurangi, banyak orang telah kehilangan pekerjaannya dan mata pencahariannya, serta kegiatan industri pengolahan juga mengalami penurunan. Hal-hal tersebut kemudian yang menyebabkan penurunan dalam perkembangan ekonomi (Adriansyah et al., 2022). Perkembangan ekonomi daerah dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Harga Berlaku dikarenakan PDRB ini bukan hanya digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi daerah, tetapi juga dapat mengetahui perubahan dan struktur ekonomi suatu daerah (Arifin, 2021). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) menurut Harga Berlaku pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2021.

Tabel 1 1 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Harga Berlaku Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB (Milliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Banjarnegara	21.599	21.694	22.828
Kabupaten Banyumas	53.949	53.683	56.920
Kabupaten Wonogiri	29.045	29.166	30.581
Kabupaten Kebumen	27.937	28.015	29.563
Kabupaten Kendal	42.551	42.586	45.165
Kabupaten Klaten	39.767	39.946	42.295
Kabupaten Pemasang	25.484	25.821	27.447
Kabupaten Cilacap	114.117	105.151	110.262
Kabupaten Blora	25.966	24.014	26.960
Kota Pekalongan	10.874	10.819	11.428
Kota Tegal	15.285	15.225	16.017

Sumber Data : BPS setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Dari Tabel. 1 diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) menurut Harga Berlaku pada tahun 2020 beberapa daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dan kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal daerah (Alfarizi & Pratomo, 2022a). Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri bahwasannya anggaran belanja modal daerah sebesar 30% dari alokasi belanja daerah (Sartika dkk., 2017). Pemerintah harus melakukan penyesuaian Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional sesuai Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu tentang percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 untuk penyesuaian belanja salah satunya pada sektor belanja modal (Putri, 2021). Belanja modal yang bukan prioritas selanjutnya akan dialihkan dalam bentuk peningkatan infrastruktur kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi untuk dunia usaha (Suparman, 2021).

Kebijakan perubahan anggaran dan realokasi APBD, yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengutamakan pengalokasian anggaran untuk *refocusing*, mengubah alokasi, serta penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ditjenbinakeuda Kemendagri, 2020). Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020, realokasi mengarah kepada langkah perubahan yaitu upaya restrukturisasi program pemerintah berdasarkan hasil realokasi anggaran (Jaweng dkk., 2020). Adapun perubahan anggaran tersebut mengarah kepada belanja kesehatan, jaring pengamanan sosial dan

pemulihan ekonomi termasuk bisnis serta masyarakat terdampak (Khatulistiwa Aerna, 2021).

Adanya kebijakan tersebut menjadikan pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah juga berupaya melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2814/SJ Nomor 177/KMK/07/2020 (Khatulistiwa Aerna, 2021). PAD merupakan sumber pendapatan yang dimiliki setiap daerah sesuai dengan kemampuan daerahnya serta sebagai faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Alfarizi & Pratomo, 2022a). Berikut perbandingan data laporan realisasi keuangan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2021.

Tabel 1 2 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020

Kabupaten/Kota	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (dalam miliaran rupiah)		
	2019	2020	2021
Banjarnegara	257,70	238,64	313,83
Banyumas	229,38	668,21	761,99
Karanganyar	387,76	384,68	426,65
Kebumen	409,16	403,03	472,02
Magelang	417,18	329,77	375,38
Pemalang	350,56	328,38	365,39
Semarang	429,01	442,53	575,74

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Menurut data yang didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di beberapa wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019-2020. Pada tahun 2020 PAD banyak dialokasikan ke belanja modal untuk peningkatan infrastruktur. Komponen yang

mempunyai peran utama dalam peningkatan infrastruktur tersebut adalah pajak daerah, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta retribusi daerah (Haryamto & Suprianto, 2022). Adanya pandemi covid-19 ini, menyebabkan pendapatan asli daerah menurun, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah juga perlu melakukan revisi anggaran untuk pengalokasian belanja modalnya dikarenakan anggaran yang ada saat ini banyak dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19 meliputi kegiatan pencegahan, disinfektan, penambahan ruangan isolasi rumah sakit, maupun penambahan layanan dasar seperti logistik (Sudaryanto, 2020).

Selain PAD, terdapat juga Dana Bagi Hasil atau yang biasa disebut DBH. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN yang kemudian dialokasikan ke daerah sesuai dengan angka presentase yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam kemampuan finansial antara pemerintah daerah dan pusat (PP No. 12 Tahun 2019). DBH merupakan dana yang potensial dan merupakan salah satu sumber utama pendanaan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja daerah non PAD (Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani, 2019). DBH ini nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal daerahnya secara efektif dan efisien (Dilapanga, Sihwahjoeni, Firdiansjah, 2020). DBH sendiri terbagi menjadi dua alokasi, yaitu DBH yang berasal dari pajak dan non pajak (sumber daya alam). Dengan adanya DBH ini diharapkan dapat meningkatkan sekaligus membantu permasalahan finansial suatu daerah untuk digunakan sebagai dana alokasi belanja modal daerah (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021).

Penelitian terdahulu (Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani, 2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian oleh (Ayem & Pratama, 2018), yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian (Suyanto & Subardjo, 2019), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Penelitian oleh (Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani, 2019), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Mundiroh, 2019), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani, 2019), menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani dkk., 2021), yang menyatakan bahwa Dana Bagi hasil Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Aditya & Maryono, 2018), yang memberikan hasil bahwasannya Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ishak, 2022), menyatakan bahwa perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajariah dkk., 2021), yang menyatakan

bahwasannya perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian (Putu & Anggarini, 2022), yang menyatakan bahwa perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pemilihan objek penelitian pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dikarenakan pada masa pandemi covid-19 menurut data laporan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) provinsi Jawa Tengah tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang drastis sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menurut data laporan badan pusat statistik pemerintah kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2020 mengalami penurunan karena Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbanyak di Indonesia mencapai 4,21 Juta dan semua merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19 yang berimbas juga kepada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Bahtiar, 2021). Transfer Dana Bagi Hasil kepada pemerintah daerah jika dilihat dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Selain itu, adanya kebijakan perubahan anggaran menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus merealokasikan anggarannya untuk penanganan pandemi Covid-19 dan mengalami perubahan anggaran yang cukup besar. Dengan ketidakstabilan dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam waktu yang singkat tersebut apakah nantinya akan mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini, belum adanya kajian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan perubahan anggaran

terhadap belanja modal pada masa pandemi covid-19 di provinsi Jawa Tengah. Fenomena diatas yang menjadi alasan dalam pemilihan objek penelitian pada pemerintah kabupaten/kota Jawa Tengah.

Penelitian ini mengangkat judul dengan mereplikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan (Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani, 2019). Alasan mereplikasi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang pernah di lakukan dahulu dengan penelitian yang akan di lakukan saat ini. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan tahun penelitian yaitu tahun 2019-2021, pada tahun tersebut adalah masa pandemi covid-19. Pengurangan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikarenakan kedua variabel tersebut tidak relevan apabila dimasukkan ke dalam penelitian ini. DAK dan DAU tidak semua daerah memiliki, karena hanya daerah tertentu yang mendapat dana alokasi apabila terdapat pembangunan infrastruktur. Penambahan variabel baru yaitu variabel perubahan anggaran karena pada masa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam keadaan darurat serta berada diluar kendali pemerintah, yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran yang cukup signifikan (Putu & Anggarini, 2022). Maka dari itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Perubahan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021?
3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021?
4. Apakah Perubahan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021?

C. PEMBATAAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Obyek penelitian hanya berfokus kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel-variabel yang dijadikan penelitian yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Perubahan Anggaran sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.
2. Menguji secara empiris pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.
3. Menguji secara empiris pengaruh positif Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.
4. Menguji secara empiris pengaruh negatif Perubahan Anggaran terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan anggaran belanja modal pemerintah dalam kondisi tekanan perekonomian yang luar biasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah terkait pengalokasian anggaran belanja modal daerah dalam menghadapi potensi resesi ekonomi.

